



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN
GROBOGAN**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan kekuatan dan bimbingan-Nya semata Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat disusun.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini disusun guna mewujudkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Di samping itu juga dalam rangka mendukung implementasi arah kebijakan dan program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Materi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini mencakup antara lain : Latar Belakang, Tupoksi dan kewenangan SKPD, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan.

Penyusunan dokumen ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan demi perbaikan di masa mendatang.

Demikian harapan kami semoga Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2024

Purwodadi, Maret 2023

KETUA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN

Dr. SUNANTO, SST.MP

NIP. 19680507 199403 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	3
Maksud dan Tujuan	4
Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU	10
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu	10
Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	12
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	12
Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD....	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	16
Tujuan dan Sasaran Renja PD	16
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	20
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024.....	20
BAB V PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD (Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan yang secara substansi merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) 2024 merupakan acuan PD (Perangkat Daerah) untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan PD guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan, sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat rencana kerja (Renja) sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan sampai dengan penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam renja PD selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Misi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Selanjutnya Renja PD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran PD.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaa Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, serta sebagai perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja PD ini

adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024 meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran jangka dalam mencapai misi dan tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan dari rencana kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam pada Tahun 2024 yang disusun dalam bentuk matriks/tabel

- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dapat lebih terarah dan secara administratif dapat memenuhi persyaratan pertanggungjawaban serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang terbatas.

Untuk melihat keberhasilan perencanaan tersebut perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan terhadap capaian rencana kerja n-1 dan n-2 yaitu tahun 2022 dan 2021. Evaluasi tersebut diperlihatkan pada Tabel II.1.

**Tabel Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas
Pertanian Kabupaten Grobogan Daerah s/d Tahun 2022**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Dinas Pertanian									
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian	2 %	2 %	2 %	2 %	100	2%	27%	850
3.27	02	02	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penggunaan pupuk berimbang	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

					Persentase kelompok tani yang menggunakan sarana pertanian sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
3.27	02	02	02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan benih bersertifikat untuk komoditas utama	60%	60%	60%	60%	100	60%	60%	100
3.27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	3%	3%	3%	3%	100	3%	22%	100
3.27	03	02	01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pemetaan detail Lahan KP2B						14389,6 Ha	14389,6 Ha	100
3.27	03	02	02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Luasan lahan pertanian yang diairi	33512 Ha	33512 Ha	34196 Ha	34196 Ha	100	34196 Ha	34196 Ha	100
					Luas Areal Penerima Manfaat Jalan Usaha Tani dalam kondisi baik	33512 Ha	33512 Ha	34196 Ha	34196 Ha	100	34196 Ha	34196 Ha	100
					balai penyuluhan dalam kondisi baik	13 Unit	13 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit	14 Unit	100
3.27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	5%		5%	5%	100	5%	22	440

					Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	9%		9%	9%	100	9%	22	244
3.27	05	02	01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT	5500 Ha					5500 Ha	5500 Ha	100
					Luas lahan yang diasuransikan	1200 Ha					1200 Ha	1200 Ha	100
3.27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani naik kelas	2%		2%	2%	100	2%	2%	100
3.27	07	02	01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kenaikan kelas kelompok tani	32 Kelompok		32 Kelompok	32 Kelompok	100	32 Kelompok	32 Kelompok	100
3.27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%		100%	100%	100	100%	100%	100
3.27	01	02	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	15%	15%	15%	15%	100	15%	15%	100
3.27	01	02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
3.27	01	02	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

					Umum Perangkat Daerah								
3.27	1	02	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
3.27	1	02	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
3.27	01	02	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, maka Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan merupakan urusan pertanian untuk mendukung misi ke 3 Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing yang dituangkan dalam Tujuan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 :

- Tujuan ke 1 **“Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pada Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah”**

Sedangkan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan juga mendukung Misi Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik yang ditungkan dalam tujuan Renstra yaitu :

- Tujuan ke 2 **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah”.**

Tabel T-C.30.**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)				269,5	270,5	271		270	270,5	271	
2	Meningkatnya Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				239.304	250.121	255.227		245.139	250.121	255.227	
3	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian				2	2	2		2	2	2	
4	Nilai evaluasi SAKIP PD				B(62)	B (68)	BB (70)		B (65)	B (68)	BB (70)	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat				B(76,20)	B (77,20)	B (77,70)		B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan berdasarkan hasil telaah terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian, telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka diperoleh gambaran isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian

Dalam beberapa dekade terakhir, kondisi sarana dan prasarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, seperti antara lain meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kurangnya penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga), serta masih rendahnya pemanfaatan potensi alat dan mesin pertanian. Maka pembangunan pertanian khususnya target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian ke depan masih diperlukan adanya dukungan prasarana dan sarana pertanian, melalui pengelolaan lahan dan air, peningkatan akses permodalan bagi petani, penyediaan pupuk pestisida yang

memenuhi azas 6 (enam) tepat serta peningkatan pemanfaatan dan fasilitasi penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

2. Rendahnya peran generasi muda dan kelembagaan pertanian terutama Gapoktan, Kelompok Tani, UPJA, penangkar dan produsen benih, kelompok pengolahan hasil, serta P3A/GP3A/IP3A

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen pembangunan nasional dalam menuju swasembada pangan. Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional di antaranya sebagai penyerap tenaga kerja, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta sebagai pendorong bergerakaknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Saat ini sektor pertanian dihadapkan pada rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Generasi muda cenderung memiliki pandangan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang kurang bergengsi, disamping hasilnya tidak segera dapat dinikmati.

3. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian telah diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Grobogan. Setelah Peraturan Bupati ini diterbitkan maka semua bentuk alih fungsi lahan pertanian

harus mengikuti aturan yang ada di dalam Perbub, namun ada alih fungsi yang dilakukan oleh petani pemilik lahan yang menjadikan lahan pertanian yang mereka miliki menjadi lahan kering non pertanian seperti rumah, toko dan lain-lain belum bisa dikendalikan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Analisis Kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024, sebagaimana tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Grobogan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2024. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sesuai dengan pemetaan nomenklatur kepmendagri 050-5889 tahun 2021 mempunyai urusan pertanian dengan lima program di tambah dengan satu program penunjang urusan pemerintahan.

Tabel. T-C.31.**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024****Kabupaten Grobogan****Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas Pertanian				69.696.314	Dinas Pertanian				69.696.314	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				69.696.314	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				69.696.314	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Kabupaten Grobogan			69.696.314	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Kabupaten Grobogan			69.696.314	
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Grobogan	Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian	2 %	14.944.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Grobogan	Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian	2 %	14.944.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Grobogan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	12 Laporan	10.064.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Grobogan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	12 Laporan	10.064.000	

	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Grobogan	Persentase penggunaan benih bersertifikat untuk komoditas utama	70%	4.880.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Grobogan	Persentase penggunaan benih bersertifikat untuk komoditas utama	70%	4.880.000	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kabupaten Grobogan	Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	3%	23.490.460	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kabupaten Grobogan	Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	3%	23.490.460	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Grobogan	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Laporan	3.932.460	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Grobogan	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Laporan	3.932.460	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Grobogan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	20 Unit	19.558.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Grobogan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	20 Unit	19.558.000	
			Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	25 Unit	-			Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	25 Unit	-	
			Jumlah balai penyuluhan pertanian kondisi baik	16 Unit	-			Jumlah balai penyuluhan pertanian kondisi baik	16 Unit	-	

3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kabupaten Grobogan	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	5%	849.050	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kabupaten Grobogan	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	5%	849.050	
			Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	9%	-			Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	9%	-	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kabupaten Grobogan	Luas Pengendalian OPT	6036 Ha	849.050	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kabupaten Grobogan	Luas Pengendalian OPT	6036 Ha	849.050	
			luas lahan yang diasuransikan	1428 Ha	-			luas lahan yang diasuransikan	1428 Ha	-	
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kabupaten Grobogan	Persentase Izin usaha pertanian yang diberikan	100%	50.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kabupaten Grobogan	Persentase Izin usaha pertanian yang diberikan	100%	50.000	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Grobogan	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang dibina	100%	50.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Grobogan	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang dibina	100%	50.000	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kabupaten Grobogan	Persentase kelompok tani naik kelas	2%	7.545.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kabupaten Grobogan	Persentase kelompok tani naik kelas	2%	7.545.000	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Grobogan	Kenaikan kelas kelompok tani	32 Kelompok	7.545.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Grobogan	Kenaikan kelas kelompok tani	32 Kelompok	7.545.000	

6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Grobogan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	22.817.804	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Grobogan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	22.817.804	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	15%	281.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	15%	281.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	17.101.304	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	17.101.304	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	650.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	650.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.040.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.040.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	130.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	130.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.155.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.155.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	1.460.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	1.460.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh hasil desk Musrenbang Kecamatan bersama Bappeda Kabupaten Grobogan serta Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, adalah sebagai berikut (terlampir T-C.32). Usulan hibah di sesuaikan dengan target yang telah di tetapkan sesuai dengan rencana strategis tahun 2021-2026 dan rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2024.

Khusus untuk Dinas Pertanian, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Grobogan.

Tabel. TC-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
	Pengadaan Combine Harvester		Jumlah Unit	7 Unit	
	Pengadaan Traktor		Jumlah Unit	23 Unit	
	Pengadaan Cultivator		Jumlah Unit	15 Unit	
	Pengadaan Power Thresher		Jumlah Unit	11 Unit	
	Pengadaan Hand Sprayer		Jumlah Unit	1 Unit	

2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	Pembangunan Prasarana Pertanian				
	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Unit	25 Unit	
	Pembangunan Jalan Usaha Tani		Jumlah Unit	35 Unit	
	Pembangunan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Unit	44 Unit	

Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

NO	USULAN	KELOMPOK MASYARAKAT/ JENIS HIBAH	ALAMAT	REKOMENDASI
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Gapoktan Ngupoyo Bogo	Desa Dimoro, Kec. Toroh	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Ngudi Rejeki	Desa Karanggeneng Kec. Godong	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
3	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Enggal Makmur	Desa Ngroto Kec. Gubug	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
4	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Langgeng Sejahtera	Desa Kunjeng Kec. Gubug	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
5	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Tri Jaya Makmur	Desa Trisari Kec. Gubug	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
6	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Makmur	Desa Ngombak Kec. Kedungjati	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
7	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan tani Jaya	Desa Kuwaron Kec. Gubug	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
8	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Jatisari	Desa Rowosari Kec.Gubug	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
9	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Mulyo Sejati	Desa Jatipecaron Kec. Gubug	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
10	Pembangunan sumur gali sawah	Gapoktan Rukun Tani	Desa Ringin Harjo Kec. Gubug	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
11	Pembangunan sumur gali sawah	Gapoktan Manunggal Tani	Desa Ringin Kidul Kec. Gubug	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku

12	Pembangunan sumur gali sawah	Gapoktan Al Barokah	Desa Kedungwungu Kec. Tegowanu	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
13	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Gapoktan Margo Tani Mulyo	Desa pojok, Kec. Pulokulon	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
14	Pengadaan Kendaraan Roda Tiga	Kelompok Tani Manunggal Karya	Dusun Padas, Desa Bendoharjo, Kec. Gabus	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
15	Pengadaan Hand Traktor	Kelompok Tani Sido Rukun	Dusun Sanggrak Desa Jambangan, Kec. Geyer	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
16	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Sari Tani	Desa Rajek Kec. Godong	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
17	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Gapoktan Suradadi Makmur	Desa Pahesan Kec. Godong	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
18	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Ngudi Luhur	Desa Kluwan kec. Penawangan	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
19	Pembangunan Jaringan Irigasi	Kelompok Tani Karya Bakti	Desa Karangpaing Kec. Penawangan	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
20	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Sido Subur	Desa Guyangan Kec. Godong	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
21	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Jaya	Desa Kemloko Kec. Godong	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
22	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Karyo Tani	Dusun Gendingan Desa Kandangrejo Kec. Klambu	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
23	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok tani barokah makmur	desa kebonagung , kecamatan Tegowanu	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
24	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Sido Dadi	Desa Kedungwungu, Kec. Tegowanu	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku

25	Pembangunan jalan usaha tani	Kelompok Tani Ngudi Rahayu	Desa Kronggen Kec. Brati.	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
26	Pembangunan jaringan irigasi	Kelompok Tani Sido Makmur 2	Desa Mojoagung Kec. Karangrayung.	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
27	Pembangunan Jaringan irigasi	Kelompok Tani Dadi Mukti	Desa kandangrejo Kec. Klambu.	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
28	Pengadaan Hand Traktor	Kelompok Tani Citra Karya	Dusun Krajan Desa Tambahrejo, Kec. Wirosari	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
29	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Mugi Rahayu	Desa Sendangrejo Kecamatan Ngaringan	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
30	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Sumber Barokah	Desa Truwolu, Kecamatan Ngaringan	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
31	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Sido Makmur	Desa Jenengan Kec. Klambu	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
32	Pembangunan Jaringan Irigasi	Kelompok Tani Dadirejo	RT 2 RW 2 Dukuh Mbah Tuan Desa Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
33	Pembangunan jalan usaha tani	Kelompok tani Margo Tani II	Desa Brabo Kec. Tanggungharjo	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
34	Pembangunan Rumah Burung Hantu	Gapoktan Sido Makmur	Desa Temurejo, Kec. Karangrayung	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
35	Pembangunan Rumah Burung Hantu	Gapoktan Sido Makmur	Desa Jenengan Kecamatan Klambu	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
36	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Ngudi Hasil	Desa Banjarsari Kec. Kradenan	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku

37	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Suko Makmur	Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
38	Pembangunan Jaringan Irigasi	Kelompok Tani Rukun Santoso	Dukuh Karanganyar Desa Sumberagung Kecamatan Godong	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
39	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Sumber Tani	Desa Kemloko Kecamatan Godong	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
40	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Tani Makmur	Desa Godong Kecamatan Godong	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
41	Pembangunan Jaringan Irigasi	Kelompok Tani Karya Tani	Desa Klampok Kecamatan Godong	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
42	Pembangunan Jaringan Irigasi	Kelompok Tani Sumbermulyo	Dusun Dowo, Desa Sumberagung Kec. Ngaringan	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
43	Pembangunan Jaringan Irigasi	Kelompok Tani Sri Lestari	Dusun pengkol, Desa Dapurno, Kec. Wirosari	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
44	Pengadaan Bantuan Bibit Tanaman Buah	Kelompok Tani Sari Tani	Dusun Bedoyo Rt 02 Rw 02 Desa Rejosari Kec. Kradenan	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
45	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Sidodadi	Desa Latak, Kec. Godong	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
46	Pembangunan Jaringan Irigasi	Gapoktan Tani Mandiri	Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
47	Pengadaan Hand Traktor	Kelompok Tani "Sidodadi"	Dusun Plosorejo Desa Karangrejo Kecamatan Gabus	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku
48	Pengadaan Sumur Gali	Kelompok Tani Sri Rejeki	Dusun Tambak, Desa Sarirejo, Kec. Ngaringan	Rekomendasi : Diproses sesuai ketentuan yang berlaku

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan pertanian Kabupaten Grobogan agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah :

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Adapun sasaran pembangunan RKP yang ditetapkan pada tahun 2024 antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7%
2. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5%
3. Tingkat pengangguran terbuka 5,0%-5,7%

4. Rasio Gini nilai 0,374-0,377
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99-74,02
6. Penurunan emisi gas rumah kaca 27,27%
7. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103-108
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107-110

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 dengan tema :

“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan SDM yang berkualitas:

Prioritas pembangunan Propinsi Jawa Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata.
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk Tahun 2024. Sementara yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Pembangunan tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan RPJMD pada tahun 2024 mengambil tema: ***“Penguatan Daya Saing SDM, Didukung Peningkatan Reformasi Birokrasi”***. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur.

Tujuan pembangunan pertanian pada tahun 2024 di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan terkait urusan pertanian. Dengan tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran pembangunan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah.
2. Nilai Tukar Petani (NTP)
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam mendukung misi ketiga Bupati Grobogan yaitu “Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman Dan Berbudaya” maka disusunlah program/kegiatan dengan dua tujuan utama Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi Pertumbuhan sektor

ekonomi unggulan daerah dan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dapat di jelaskan dalam tabel T-C. 33 (terlampir).

Tabel. TC. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Dinas Pertanian								
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				69.696.314	DAU			83.635.577
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		Kabupaten Grobogan		69.696.314	DAU			83.635.577
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian	Kabupaten Grobogan	2%	69.696.314	DAU		2%	83.635.577
3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Grobogan	12 Laporan	14.944.000	DAU		12 Laporan	17.932.800

3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan benih bersertifikat untuk komoditas utama	Kabupaten Grobogan	70%	10.064.000	DAU		70%	12.076.800
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	Kabupaten Grobogan	3%	4.880.000	DAU		3%	5.856.000
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Grobogan	1 Laporan	23.490.460	DAU		1 Laporan	28.188.552
3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Kabupaten Grobogan	20 Unit	3.932.460	DAU		20 Unit	4.718.952
					Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		25 Unit	19558000	DAU		25 Unit	23.469.600
					Jumlah balai penyuluhan pertanian kondisi baik		16 Unit		DAU		17 Unit	-
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	Kabupaten Grobogan	5%	849.050	DAU		5%	1.018.860

					Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan		9%	-	DAU		9%	
3	27	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT	Kabupaten Grobogan	6036 Ha	849.050	DAU		6036 Ha	1.018.860
					luas lahan yang diasuransikan		1428 Ha	-	DAU		1558 Ha	
3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin usaha pertanian yang diberikan	Kabupaten Grobogan	100%	50.000	DAU		100%	60.000
3	27	06	2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang dibina	Kabupaten Grobogan	100%	50.000	DAU		100%	60.000
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan	2%	7.545.000	DAU		2%	9.054.000
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan	32 Kelompok	7.545.000	DAU		32 Kelompok	9.054.000
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kabupaten Grobogan	100%	22.817.804	DAU		100%	27.381.365

3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kabupaten Grobogan	15%	281.500	DAU		15%	337.800
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kabupaten Grobogan	100%	17.101.304	DAU		100%	20.521.565
3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	100%	650.000	DAU		100%	780.000
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	100%	2.040.000	DAU		100%	2.448.000
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kabupaten Grobogan	100%	130.000	DAU		100%	156.000

3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Grobogan	100%	1.155.000	DAU		100%	1.386.000
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kabupaten Grobogan	100%	1.460.000	DAU		100%	1.752.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan. Secara khusus, Dinas Pertanian memiliki peran dalam pencapaian misi ketiga Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing indikator tujuan “Pertumbuhan ekonomi” dan indikator sasaran “Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan”;
3. Keserasian dan keterpaduan sector-sektor lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan sector Pertanian Kabupaten Grobogan;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian Kabupaten Grobogan;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;

6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas

Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dinas Pertanian			69.696.314.360
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			69.696.314.360
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			69.696.314.360
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			14.944.000.000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		10.064.000.000
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.900.000.000
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7.164.000.000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan		4.880.000.000

		Kabupaten/Kota		
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	400.000.000
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4.100.000.000
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	380.000.000
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			23.490.460.000
		Pengembangan Prasarana Pertanian		3.932.460.000
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	300.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.232.460.000
			Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	400.000.000
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian		19.558.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.686.000.000

			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	200.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.300.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	800.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	6.572.000.000
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			849.050.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		849.050.000
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	761.050.000
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	88.000.000
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			50.000.000
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000

03			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	50.000.000
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			7.545.000.000
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		7.545.000.000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	375.000.000
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	525.000.000
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	595.000.000
			Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	4.650.000.000
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.400.000.000
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.817.804.360
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		281.500.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.500.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.101.304.360
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.026.304.360
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		650.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.040.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	800.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000
			Penyediaan Bahan/Material	200.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		130.000.000
			Pengadaan Mebel	20.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.155.000.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.460.000.000

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.200.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, guna menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan serta sasaran dan target pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan berfungsi sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain yang berkaitan.